

LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA LAHAT

TAHUN 2024



KPP Pratama Lahat

Jl. Akasia Kavling Bandar Jaya, Lahat
(0731) 325987

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

LAKIN tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat pada tahun anggaran 2024. LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.

Pelaksanaan Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dilandasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.01/2020 Tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat telah menetapkan Visi dengan mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: ***“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa Untuk Menghimpun Penerimaan Negara Melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.”***

Dengan pernyataan Visi tersebut terkandung suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan laporan ini. Semoga LAKIN ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja kantor di masa depan.

Demikian LAKIN ini disusun guna memberikan informasi kerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat pada tahun anggaran 2024 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Lahat, 22 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Andy Whisnu Wardhana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Profil KPP Pratama Lahat.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Lahat	1
BAB II	6
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Pernyataan Visi Dan Penjasarannya	7
C. Pernyataan Misi Dan Penjasarannya	7
D. Struktur Organisasi	7
E. Sumber Daya Manusia	9
F. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	10
G. Tujuan	10
H. Sasaran	10
BAB III	11
AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran.....	16
D. Penghargaan.....	16
BAB IV	19
PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	19
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	20

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat pada tahun anggaran 2024. LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat. Pelaksanaan Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan. Untuk mencapai Visi tersebut, maka perlu misi yang akan dilakukan. Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: 1) **merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia**, 2) **meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil**, 3) **mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi**.

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang dijalankan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi, menunjukkan persentase rata-rata pencapaian target kinerja organisasi sebesar 110,62. Pencapaian ini juga dapat dilihat dari tercapainya penerimaan KPP Pratama Lahat tahun 2024 sebesar Rp1.431.549.303.627,00 dari target penerimaan sebesar Rp1.417.857.360.000,00.

Dengan tersusunnya LAKIN Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat tahun 2024, diharapkan aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2025. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam Visi dan Misi dapat tercapai. Selain itu, diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil KPP Pratama Lahat



Halaman depan KPP Pratama Lahat

KPP Pratama Lahat merupakan salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlokasi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. KPP Pratama Lahat bertanggung jawab atas pelayanan, pengawasan, dan penerimaan pajak di wilayah administratif meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam.

B. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Lahat

Sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.01/2020 Tanggal 18 November 2020, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat mempunyai tugas melaksanakan administrasi perpajakan di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.



Struktur Organisasi KPP Pratama Lahat

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat setelah diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.01/2020 Tanggal 18 November 2020, adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat terdiri dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat membawahi 2 (dua) Kantor Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yaitu KP2KP Empat Lawang dan KP2KP Pagar Alam.



Halaman depan KP2KP Empat Lawang



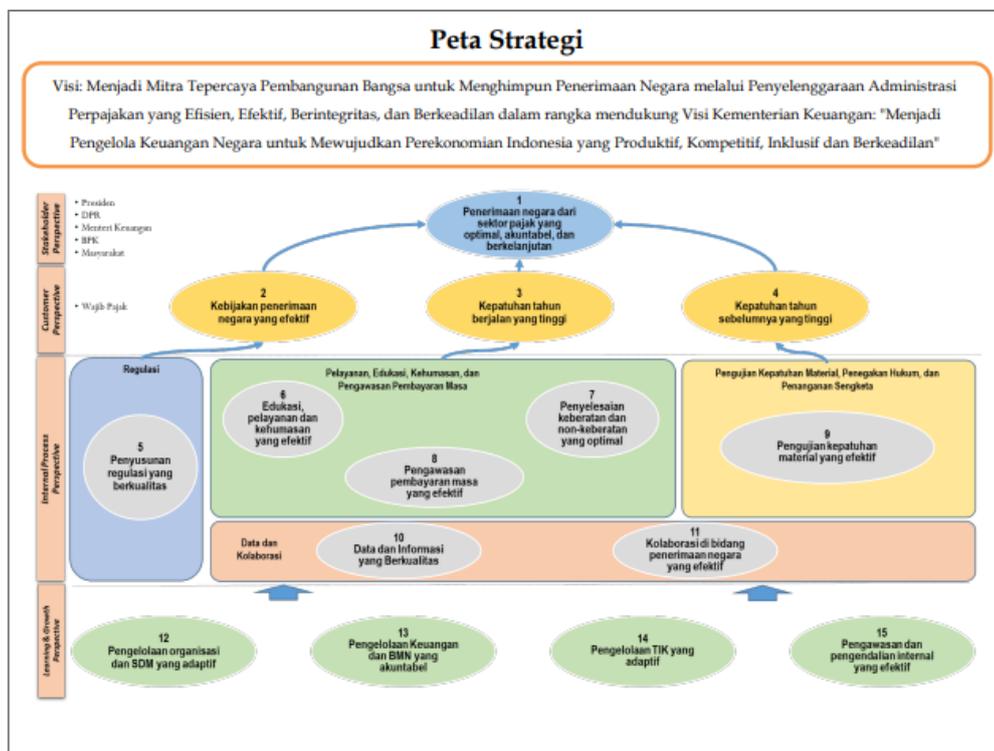
Halaman depan KP2KP Pagar Alam

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang diperankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat pada hakikatnya merupakan amanat Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan secara transparan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut diatas, maka sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat. Laporan ini disusun berdasarkan Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis



Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024

Perencanaan Strategis adalah proses berkesinambungan dalam pembuatan keputusan secara sistematis dengan pemahaman terbaik atas masa depan organisasi, menata upaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusan tersebut secara sistematis, mengukur hasil dari keputusan yang telah diambil terhadap ekspektasi diawal melalui umpan balik yang sistematis.

Perencanaan Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat mengacu pada Renstra induk organisasi berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Yang tertera dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan IKU yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Lahat tahun 2024.

Untuk dapat merespon perkembangan situasi dan kondisi saat ini maupun antisipasi terhadap kondisi di masa depan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki pedoman yang jelas sebagai pegangan untuk bekerja saat ini dan pengembangan di masa mendatang berupa pernyataan Visi dan Misi.

Sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak, maka Visi dan Misi yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat adalah sama dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak sehingga diharapkan akan diperoleh persamaan sikap pandang dan sikap perilaku antara unit Vertikal dengan unit induknya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan

B. Pernyataan Visi Dan Penjelasannya

Visi Direktorat Jenderal Pajak

"Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan."

Visi tersebut merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

C. Pernyataan Misi Dan Penjelasannya

Misi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk mencapai visi tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi sebagai berikut:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan berdasarkan Pasal 61A Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data bertugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan bertugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I s.d. Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan I s.d. Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

E. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data terakhir 31 Desember 2024, Sumber Daya Manusia yang terdapat di KPP Pratama Lahat berjumlah 80 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut :

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1
Kepala Seksi	8
Kepala Subbag	1
Kepala KP2KP	2
Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak	1
Account Representative	23
Fungsional Pemeriksa Pajak	3
Fungsional Penyuluh Pajak	3
Fungsional Penilai Pajak	1
Juru Sita	1
Bendaharawan	1
Sekretaris	1
Pelaksana	34
Total	80

F. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Kunci Keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai-nilai profesionalisme Sumber Daya Manusia yang ada (menyangkut integritas, disiplin, dan kompetensi);
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak;
3. Memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik (prima) kepada masyarakat Wajib Pajak;
4. Meningkatkan Law Enforcement; dan
5. Menerapkan sistem administrasi yang baik dan sistem teknologi informasi tepat guna.

G. Tujuan

Adapun tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat mengacu pada tujuan utama misi fiskal Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi induk. Tujuan dari misi utama tersebut adalah untuk menghimpun penerimaan pajak yang berarti pengalihan sebagian sumber daya masyarakat kepada pemerintah.

H. Sasaran

Sedangkan sasaran dari tujuan utama tersebut adalah tercapainya target penerimaan tahun 2024 untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat adalah sebesar Rp1.417.857.360.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat adalah perwujudan kewajiban dari sebuah rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara teknis dilakukan melalui pengukuran kinerja kegiatan yang dapat diuraikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan jenis indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis.
2. Menghitung persentase (%) pencapaian target dari masing-masing indikator dari masing-masing Sasaran Strategis.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,97%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,63
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	127,36%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	105,74%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		

4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,52%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,48%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,53%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,14%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,14%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	80,50%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	98,01
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,84
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00

B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis (SS) 1 : **Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Persentase realisasi penerimaan pajak**

Persentase realisasi penerimaan pajak mencapai 100,97% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.431.549.303.627,00 dari target penerimaan sebesar Rp1.417.857.360.000,00.
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : **Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 103,63.

2. Sasaran Strategis (SS) 2 : **Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencapai 100,04%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100,00%.
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : **Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 127,36%. Realisasi ini melebihi target yaitu sebesar 100,00%.

3. Sasaran Strategis (SS) 3 : **Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material mencapai 105,74% melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100,00%.

4. Sasaran Strategis (SS) 4 : **Edukasi dan pelayanan yang efektif**
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Lahat dapat mencapai realisasi sebesar 88,80%. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan, yaitu 74,00%. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama optimal yang dilakukan oleh seluruh seksi yang ada pada KPP Pratama Lahat serta

berkoordinasi dengan KP2KP Pagar Alam dan KP2KP Empat Lawang dengan melakukan penyuluhan hingga 3 kabupaten, meliputi Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : **Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan mencapai 108,52%, melebihi dari target yang direncanakan yaitu sebesar 100,00%.

5. Sasaran Strategis (SS) 5 : **Pengawasan pembayaran masa yang efektif**

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Persentase pengawasan pembayaran masa**

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 ini berhasil melebihi target hingga 120,00% dari target yang telah ditetapkan, yaitu 90,00%.

6. Sasaran Strategis (SS) 6 : **Pengawasan kepatuhan material yang efektif**

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

Target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 sebesar 100,00% dan telah tercapai sebesar 118,48%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan respon balik dari WP yang merupakan salah satu bukti kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : **Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai 120,00% dari target sebesar 100%.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : **Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu telah tercapai sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.

7. Sasaran Strategis (SS) 7 : **Penegakan hukum yang efektif**

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian mencapai 119,14% dari target sebesar 100,00%.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : **Tingkat efektivitas penagihan**

Tingkat efektivitas penagihan mencapai 107,14% dari target sebesar 75,00%.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : **Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tercapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.
8. Sasaran Strategis (SS) 8 : **Data dan Informasi yang berkualitas**
- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai 120,00% dari target sebesar 100,00%.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : **Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tercapai 80,50% dari target sebesar 55,00%.
9. Sasaran Strategis (SS) 9 : **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**
- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebesar 117,50 telah melebihi target sebesar 100,00.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : **Indeks Penilaian Integritas Unit**
Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 ialah sebesar 98,01 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 85.
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : **Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko mencapai realisasi sebesar 98,84 melebihi target sebesar 90,00.
10. Sasaran Strategis (SS) 11 : **Pengelolaan keuangan yang akuntabel**
- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : **Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**
Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yaitu 120,00. Realisasi ini sudah tercapai dari target yang diamanahkan yaitu 100,00.

C. Realisasi Anggaran

Dalam 4 (empat) perspektif, 10 (sepuluh) sasaran strategis, dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utamayang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat mendukung dalam merealisasikan kinerja sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

No.	Sumber Dana	Jumlah	
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
1	DIPA	Rp7.444.806.000,00	Rp7.667.520.000,00
2	SKO	0	0
Jumlah		Rp7.444.806.000,00	Rp7.667.520.000,00

Adapun realisasi penyerapan dana untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp7.427.785.186,00 atau 96,87% dari anggaran yang tersedia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Semula	Jumlah Belanja	Realisasi Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp733.883.000,00	Rp697.402.000,00	95,03%
2	Belanja Barang	Rp5.657.337.000,00	Rp5.466.056.566,00	96,62%
3	Belanja Modal	Rp1.276.300.000,00	Rp1.264.326.620,00	99,06%
Jumlah		Rp7.667.520.000,00	Rp7.427.785.186,00	96.87%

Ketersediaan dana yang cukup sangat menunjang terlaksananya rencana kegiatan-kegiatan yang tidak/belum direalisasikan atau tidak direncanakan karena mengingat keterbatasan dana yang tersedia. Untuk tahun-tahun selanjutnya akan diusahakan sinkronisasi antara kegiatan dan dana yang tersedia. Pada dasarnya pelaksanaan aspek keuangan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

D. Penghargaan

Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Lahat telah berhasil meraih penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang luar biasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan upaya keras KPP Pratama Lahat dalam meningkatkan kepatuhan pajak, serta memperkuat sistem administrasi perpajakan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen KPP Pratama Lahat dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

Beberapa penghargaan yang diterima oleh KPP Pratama Lahat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penghargaan	Tanggal	Dasar Penghargaan
1	KPP dengan Capaian IKU Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan OP Tahun 2023 Melebihi 100%	22 Januari 2024	KEP-62/WPJ.03/2024
2	KPP dengan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023 Melebihi 100%	22 Januari 2024	KEP-62/WPJ.03/2024
3	KPP dengan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Melebihi Target yang Telah diamankan Sebanyak Lima Tahun Berturut-turut (2019 s.d. 2023)	22 Januari 2024	KEP-62/WPJ.03/2024
4	Peringkat II Kepala Seksi Pengawasan dengan Kinerja Terbaik Tahun 2023 Segmen Wajib Pajak Strategis KPP Pratama (Sarifudin)	19 Februari 2024	-
5	Kepala KP2KP Terbaik II Tahun 2023 (Kemas Ismail Thobrani)	21 Februari 2024	-
6	Kepala Seksi Pelayanan Terbaik III Tahun 2023 (Dedy Agus Prabowo)	21 Februari 2024	-
7	Unit Kerja dengan Taxmin Terbaik III Tahun 2023	21 Februari 2024	-
8	Kinerja Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2023	26 Januari 2024	ND-867/WPJ.03/2024
9	Juara 3 Lomba Biliar dalam Memperingati Hari Pajak Tahun 2024 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	11 Juli 2024	KET-43/WPJ.03/2024
10	Juara 2 Lomba Tenis Lapangan dalam Memperingati Hari Pajak Tahun 2024 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	11 Juli 2024	KET-43/WPJ.03/2024

11	Juara 3 Lomba Tenis Meja Kategori Putra dalam Memperingati Hari Pajak Tahun 2024 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	11 Juli 2024	KET-43/WPJ.03/2024
12	Juara 5 Virtual Run Individu Wanita dalam Memperingati Hari Pajak Tahun 2024 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	11 Juli 2024	KET-43/WPJ.03/2024
13	Juara 3 Cerdas Cermat Pajak dalam Memperingati Hari Pajak Tahun 2024 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	11 Juli 2024	KET-43/WPJ.03/2024
14	Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan BA 015 TA 2023 Audited	04-Sep-24	ND-3588/PJ.01/2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat pada tahun anggaran 2024. LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dapat dikatakan berhasil dan tidak menyimpang secara signifikan dari rencana apabila dari 4 (empat) perspektif, 10 (sepuluh) sasaran strategis, dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama yang dilaksanakan menunjukkan nilai capaian yang sangat baik dengan persentase rata-rata pencapaian kinerja kegiatan yang menunjukkan angka lebih dari 100%. Kegiatan-kegiatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mendukung dalam merealisasikan kinerja sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu tercapainya penerimaan KPP Pratama Lahat tahun 2024 sebesar Rp1.431.549.303.627,00 atau 100,97% dari rencana sebesar Rp1.417.857.360.000,00.

B. Saran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat melakukan langkah untuk memitigasi kinerja di 2025 dengan langkah-langkah:

- a) Menyiapkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada sehingga semakin produktif dan kompetitif;
- b) Melakukan perbaikan terus menerus, dalam hal eksternal dan internal;
- c) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak untuk mewujudkan pelayanan prima;
- d) Memitigasi kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2025.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Kerja : KPP Pratama Lahat

Tahun Anggaran : 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,97%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,63
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	127,36%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	105,74%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,52%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,48%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,53%

7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,14%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,14%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	80,50%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	98,01
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,84
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp7.667.520.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp7.427.785.186,00